

KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PENGGERAK EKONOMI PANCASILA

Inggar Saputra¹, Akhmad Saoqillah²

¹ Staf Pengajar Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Mercubuana, Jakarta, Indonesia

² Staf Pengajar Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Attahiriyah, Jakarta, Indonesia

* E-mail korespondensi : genmuslim.100@gmail.com; vj.okky@gmail.com

Informasi Artikel

Draft awal: 3 Mei 2017
Revisi : 25 Mei 2017
Diterima : 1 Juni 2017
Available online: 30 Juni 2017

Kata Kunci:
Ekonomi pancasila, koperasi

Tipe Artikel : Point View



Diterbitkan oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Islam
Attahiriyah

ABSTRACT

This paper discusses the economics conception of Pancasila as the strategic value of the five precepts formulated by the founders of the nation. The method in this research is library research. The result of the study is Pancasila economics has the spirit of divinity, humanity, national unity, populist and social justice. The conclusion of this research is Pancasila economics present in the form of Koperasi as "soko guru" which aim to realize prosperity of Indonesian people.

Artikel ini membahas konsepsi ekonomi Pancasila yang berdasarkan nilai strategis pada kelima sila yang dirumuskan para pendiri bangsa. Metode dalam penelitian ini adalah *library research*. Hasil kajian adalah ekonomi Pancasila memiliki semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan nasional, kerakyatan dan keadilan sosial. Kesimpulan penelitian ini adalah ekonomi Pancasila hadir dalam bentuk koperasi sebagai soko guru yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

1. Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam dan manusia yang dapat dikembangkan sehingga berpotensi menjadi negara besar. Potensi sumber alam Indonesia seperti minyak bumi dan gas saat ini memiliki nilai yang besar untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal itu belum ditambah kekayaan sumber daya alam lainnya seperti pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan. Dengan berbagai kandungan sumber daya alam itu, jika mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik maka dapat mewujudkan cita-cita negara yang adil, makmur dan sejahtera sebagaimana diamanatkan konstitusi.

Meski potensi itu ada, harus diakui tidak semudah membalik telapak tangan agar kekayaan alam Indonesia itu dapat dimaksimalkan untuk kepentingan rakyat. Situasi global sekarang ini, Indonesia dihadapkan pada mengguritanya sistem ekonomi kapitalisme dimana penguasaan kekayaan alam Indonesia dikuasai segelintir orang. Bermodalkan kekuatan uang yang besar, kelompok kapitalis mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia demi kepentingan diri dan kelompoknya. Untuk itu penting kiranya agar Indonesia berusaha keluar dari sistem ekonomi kapitalisme yang meminggirkan kesejahteraan rakyat, melahirkan kesenjangan sosial dan

melemahkan kedaulatan nasional karena pengelolaan ekonomi berjalan melalui sistem pasar bebas.

Pilihan pemerintah Indonesia sekarang untuk mengikuti sistem kapitalisme sesungguhnya lahir dari sebuah proses yang panjang. Sejak Indonesia meraih kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, persoalan ekonomi termasuk system ekonomi selalu menjadi perhatian penting para pendiri bangsa. Mereka berdiskusi secara serius mengenai konsep ekonomi apa yang akan dipakai bangsa Indonesia ke depan. Pokok persoalan berkisar kepada sistem ekonomi yang tepat untuk mengembangkan perekonomian Indonesia di masa mendatang. Mereka juga mempertimbangkan bagaimana arah dan visi pembangunan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan.

Dalam perjalanan sejarah kita juga dapat melihat bagaimana pada awal kemerdekaan Indonesia tahun 1945-1950 bangsa ini menganut sistem ekonomi campuran antara liberalisme dan sosialisme. Kemudian tahun 1950-1959 pemerintahan Orde Lama mengarahkan bangsa Indonesia untuk menganut sistem ekonomi liberalisme. Masyarakat diberikan kebebasan mengembangkan perekonomian tanpa banyak intervensi dari pemerintah. Tapi sejak 1959 pemerintah Indonesia mengarahkan perekonomian nasional kepada sistem sosialisme Indonesia yaitu bentuk sosialisme bercorak nasional dengan melibatkan adanya intervensi pemerintah dalam kegiatan perekonomian melalui sarana koperasi dan Badan Usaha Milik Negara (Dawam Rahardjo, 2009).

Jatuhnya Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemimpin Orde Baru membawa sistem perekonomian Indonesia mengikuti arus kapitalisme global. Paradigma pembangunan nasional mengalami pergeseran dari politik sebagai panglima pada zaman Orde Lama menjadi ekonomi sebagai panglima. Pada masa awal kekuasaannya, Soeharto berhasil melesatkan ekonomi Indonesia hingga mencapai puncak kejayaan sebagai negara swasembada beras. Tapi mentalitas negatif korupsi, kolusi dan nepotisme yang menggurita melalui kelompoknya ditambah menumpuknya hutang luar negeri dan krisis ekonomi yang menghantam Asia Tenggara pada tahun 1997 membuatnya mundur dari kursi kekuasaannya pada 21 Mei 1998.

Pasca reformasi, perekonomian Indonesia ternyata belum mampu beranjak bangkit disebabkan masih mengakarnya sistem ekonomi kapitalisme. Para pemimpin negara era reformasi sampai sekarang masih belum sepenuhnya mampu menghadirkan perekonomian nasional yang manusiawi, menyejahterakan dan berkeadilan sosial. Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia masih diwarnai kebijakan deregulasi, privatisasi dan liberalisasi perdagangan yang merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Keadilan dan pemerataan ekonomi belum berjalan baik sebagaimana masih terlihat dari masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Anggaran negara untuk pemberdayaan sosial-ekonomi juga tidak tepat sasaran karena maraknya oknum yang menjalankan praktek "bancakan" anggaran yang membuat rakyat semakin menderita.

Dalam kondisi keterpurukan bangsa yang masih didominasi kapitalisme global, muncul kesadaran kembali kepada sistem ekonomi Pancasila yang dijiwai semangat lima nilai dalam Pancasila. Pemikiran ini berangkat dari keinginan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam sistem ekonomi nasional. Dimana kegiatan ekonomi harus dijiwai religiusitas dengan menekankan kepada etika-moral, mengusung semangat keadilan dan keadaban, mengokohkan semangat nasionalisme Indonesia, berpihak kepada kepentingan rakyat dengan dijiwai semangat kekeluargaan dan menciptakan kemakmuran kepada seluruh rakyat Indonesia.

Pemikiran ekonomi Pancasila sebenarnya bukan barang baru. Jauh sebelumnya pada tahun 1906, Muhammad Hatta yang melihat maraknya koperasi di Eropa sudah mulai merancang konsep ekonomi yang berlandaskan semangat keswadayaan dan keadilan sosial. Adanya konsep koperasi menginspirasi dirinya untuk merumuskan pasal 33 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi *"Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan"* Ketika melihat kondisi rakyat Indonesia yang terpuruk secara ekonomi akibat penguasaan bahan makanan pokok dan industrialisasi membuatnya terinspirasi merumuskan ayat 2 yaitu *"Cabang – cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara"* Sementara praktik tanam paksa yang memberatkan beban kehidupan rakyat Indonesia membuatnya mencetuskan ayat 3 bahwa *"Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat"*

Melalui rumusan itu kita dapat melihat bagaimana Hatta membangun kerangka berfikir sistem ekonomi yang mengarah kepada solidaritas dan keadilan sosial. Penguasaan ekonomi tetap mengizinkan pihak swasta atau individu berkembang tapi negara harus tetap melakukan kontrol agar tidak merugikan kepentingan rakyat. Dalam hal ini, Mubyarto (2003) menjelaskan, pasal 33 merupakan bentuk ekonomi kekeluargaan yang demokratis dan mendorong adanya kemakmuran masyarakat. Pasal tersebut memberikan gambaran bahwa ekonomi Indonesia harus bercirikan nilai yang ada dalam Pancasila, bukan sistem ekonomi kapitalisme yang banyak bertentangan dan merugikan kepentingan bangsa Indonesia.

2. Kajian Pustaka

Pada dasarnya manusia Indonesia bukan sekedar manusia ekonomis, tetapi manusia yang dalam kehidupannya berpijak kepada nilai religius, sosial-budaya, kehidupan ekonomi nyata dan tidak bebas nilai. Dengan berdasarkan hal tersebut, pilihan ideologi ekonomi Indonesia bertujuan menyejahterakan rakyat Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, ekonomi Indonesia selayaknya mengacu kepada nilai dan tradisi yang berkembang di Indonesia. Maka sistem ekonomi yang dirasakan sesuai adalah sistem ekonomi Pancasila.

Dalam pandangan Muhammad Hatta (1979) tujuan ekonomi Indonesia harus memiliki kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan. Perasaan bahagia akan tercapai ketika manusia Indonesia tercukupi standar kebutuhan hidupnya yang mencakup pangan, papan dan sandang. Kesejahteraan muncul jika ketenangan lahir dan batin dapat dicapai dalam menjalani aktivitas sehari-hari sehingga menghindarkan dirinya dari ancaman kemiskinan. Kedamaian sebagai impian semua orang akan muncul jika rasa persaudaraan dan semangat menghargai perbedaan dapat hidup di kalangan masyarakat Indonesia baik sesama anak bangsa, maupun pergaulan manusia Indonesia dalam dunia internasional. Sedangkan kemerdekaan hadir jika setiap manusia bebas dari penindasan, bebas menyampaikan pendapat lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama sesuai keyakinannya dan terbebas dari ancaman penjajahan.

Mengacu kepada pemikiran Hatta, maka sistem ekonomi yang dibangun harus berdasarkan semangat dan nilai ke-Indonesiaan. Perekonomian Indonesia tidak menganut sistem kapitalis atau sosialis, melainkan sistem ekonomi yang berasal dari ruh Pancasila sebagai nilai dasar strategis yang mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Sistem ekonomi Pancasila hadir untuk mengoreksi sistem ekonomi kolonial, serta menjadi jalan tengah diantara perebutan pengaruh para penganut sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis.

Tabel 1. Perbandingan paradigma ekonomi kapitalisme, sosialisme dan pancasila paradigma

Komponen	Kapitalisme	Sosialisme	Pancasila
Relasi	Minim campur tangan negara	Negara memainkan peran utama	Penguasaan negara untuk kemamuran rakyat
Pelaku	Individu/Swasta	Negara, Kolektivisme	Usaha bersama/ Koperasi bercorak gotong royong
Harga	Mekanisme pasar	Dikendalikan negara	Kebutuhan dasar dikendalikan negara

Sumber : Arif Budimanta (2010: 5)

Pemikiran ekonomi Pancasila sejatinya berhubungan erat dengan pemikiran ekonomi kerakyatan yang digagas Muhammad Hatta ketika melihat secara langsung penerapan koperasi sebagai gerakan swadaya sosial selama berkuliah di Belanda. Hal ini memberikan inspirasinya dalam merumuskan konsep ekonomi kerakyatan yang muncul dalam pasal 33 UUD 1945. Tapi secara istilah, gagasan ekonomi Pancasila sendiri mulai berkembang melalui tulisan Emil Salim yang menjelaskan pada pokoknya ekonomi Pancasila adalah sebuah konsep kebijaksanaan ekonomi yang bergerak seperti bandul jam dari kiri ke kanan sampai mencapai titik keseimbangan. Ini sering disebut ekonomi pasar terkendali, bahwa sistem ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintah. (Dawam Rahardjo, 2004).

Dengan berpedoman kepada nilai pancasila maka sistem ekonomi yang dibangun harus sejalan, sesuai dan setia kepada lima sila yang ada. Dalam hal ini, dapat dijelaskan jika sebuah daerah secara konsisten menerapkan kebijakan ekonomi yang bertujuan membentuk masyarakat adil dan makmur, maka pemerintah daerah tersebut sudah mengamalkan sistem ekonomi Pancasila. Dalam kasus lain, jika perusahaan pemerintah atau swasta sudah menerapkan kebijakan yang mampu membuat kesejahteraan karyawan sehingga kesenjangan karyawan dan atasan semakin berkurang, maka perusahaan tersebut sudah mengamalkan asas ekonomi Pancasila (Mubyarto, 2003).

Mubyarto dalam sebuah artikelnya "Menebus Dosa-Dosa Ekonomi Indonesia" menegaskan ekonomi Pancasila adalah ekonomi pasar yang mengacu kepada Pancasila. Dalam bekerja, sistem ini harus berdasarkan data riil ekonomi Indonesia dan bersifat moralistik, sosio-nasionalistik dan sosio-demokratik. Ekonomi Pancasila harus mampu menggambarkan manusia Indonesia sebagai *homo socius*, *homo ethicus* dan *homo economicus* dalam sistem ekonomi berdasarkan asas kekeluargaan (Hastangka, 2007). Dalam penjabarannya, ekonomi Pancasila bertentangan dengan ekonomi kapitalistik yang berfokus kepada keuntungan pribadi maupun sistem ekonomi sosialis yang menentang kepemilikan individu dan menyerahkan semua urusan perekonomian kepada negara. Mubyarto memberikan beberapa ciri-ciri dari ekonomi Pancasila. Pertama, perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, moral dan sosial., Kedua, keinginan yang kuat dari seluruh rakyat Indonesia untuk menciptakan pemerataan sosial sesuai nilai kemanusiaan. Ketiga, prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah menciptakan perekonomian Indonesia yang tangguh dan memiliki jiwa nasionalisme tinggi. Keempat, koperasi adalah wadah paling konkret dari usaha bersama yang jadi dasar ekonomi Pancasila. Kelima, adanya pertimbangan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat pemerintah pusat dan pelaksanaan di daerah untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi. (Rahardjo, 2009)

Dalam pandangan lainnya, Dawan Rahardjo (2004) menggambarkan sistem ekonomi Pancasila merupakan sebuah sistem sistem ekonomi yang disusun berdasarkan UUD 1945 dimana di dalamnya terkandung Pancasila khususnya pasal 33 yang secara implementasinya diperankan

oleh koperasi. Koperasi yang dimaksud sebagaimana pernah dijelaskan Bung Hatta adalah koperasi yang dibentuk di atas perekonomian rakyat meliputi usaha mikro, usaha kecil dan menengah. Melalui koperasi, ekonomi Pancasila memainkan peran secara operasional untuk menjadikan masyarakat Indonesia bebas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan partisipasi rakyat dalam kegiatan ekonomi sehingga dibutuhkan kesadaran kolektif untuk mengingatkan rakyat bahwa Pancasila juga harus dimaknai tafsirnya secara sosial-ekonomi.

Serupa dengan pemikir di atas, Kartasasmita (1997: 3) menjelaskan ekonomi Pancasila berakar dari bumi Indonesia dengan mengacu kepada nilai agama sebagaimana sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa. Penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan di Indonesia harus berlandaskan etika, moral dan akhlak. Ini semakin diperjelas oleh Swasono (1981: 1) bahwa ekonomi Pancasila memiliki hubungan erat dengan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila. Secara normatif, landasan ekonomi Pancasila ada dalam pasal 23, 27 ayat 2, pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Dalam sistem ekonomi Pancasila ada beberapa hal yang harus dihindari yaitu: a) Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia. b) Sistem etatisme dalam arti bahwa negara beserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi diluar sektor negara. c) Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.

3. Metode

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode *library research*. Dalam hal ini penulis menggunakan buku-buku dari perpustakaan sebagai bahan referensi, dimana penulis mencari literatur yang sesuai penelitian ini. Selain itu penulis juga memakai sumber kajian empirik dari penelitian yang sudah ada terkait koperasi dan ekonomi Pancasila.

4. Pembahasan

Pancasila adalah produk khas pemikiran pendiri bangsa Indonesia sehingga ekonomi Pancasila merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Ekonomi Pancasila mengusung semangat usaha bersama di antara pelaku ekonomi yang dapat ditemukan secara nyata dalam bentuk koperasi. Di Indonesia, koperasi merupakan sebuah badan usaha bersama yang bersifat legal-formal. Sebagai lembaga sosial-ekonomi, koperasi merupakan perwujudan nyata konsep ekonomi Pancasila yang bertujuan menolong individu secara bersama-sama atau berkelompok.

Dalam koperasi, setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mampu menghidupkan peran kesetiakawanan dan keadilan sosial secara nyata. Dalam menumbuhkan perekonomian nasional, koperasi sangat berperan signifikan dalam mendorong pendapatan nasional. Melalui koperasi diciptakan daulat rakyat, dimana hubungan antar manusia dijiwai semangat kebersamaan untuk maju bukan seperti ekonomi kapitalisme yang sibuk mengejar keuntungan ekonomi semata meski harus meminggirkan nilai moral, etika dan akhlak.

Pengenalan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak kemerdekaan, dimana pendiri bangsa menginginkan ekonomi Indonesia mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang makmur dalam kebersamaan dan bersama dalam kemakmuran (Sutrisno, 2003) Pengembangan koperasi diarahkan mampu memenuhi jiwa Pancasila dan UUD 1945 dimana koperasi merupakan lembaga kehidupan rakyat Indonesia yang dijamin hak hidupnya untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sehingga berhasil mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia (Hariyono, 2003).

Koperasi adalah model dalam kehidupan nyata dari konsepsi ekonomi Pancasila. Beberapa hal yang mendukung pandangan ini. Pertama, koperasi berlandaskan semangat ekonomi moral, etika dan akhlak dengan mengupayakan setiap anggotanya sejahtera dan maju bersama, bukan sibuk mengejar keuntungan pribadi dengan menghalalkan segala cara. Kedua, secara sosio-budaya, koperasi sesuai dengan semangat kebersamaan atau kolektivitas yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia sejak dulu. Ketiga, koperasi berangkat dari pemikiran mengenai kenyataan dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia, yang mengalami kemiskinan dan kesenjangan sosial tinggi sehingga dibutuhkan jembatan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui konsep koperasi ini. Dengan beberapa variabel itu, maka dapat koperasi dapat mendorong kehidupan rakyat yang makmur dan sejahtera.

Sementara mengacu kepada konsep tujuan ekonomi dari Muhammad Hatta, setiap anggota dapat memaksimalkan koperasi dalam mencukupi standar kebutuhan hidupnya baik papan, pangan, sandang dan kebutuhan lainnya. Dalam koperasi, juga terdapat peluang pinjaman dengan persyaratan yang tidak seketat dunia bisnis komersial. Pinjaman itu dapat dipakai anggota untuk memulai usaha menuju kehidupan ekonomi yang lebih baik. Selain itu semangat kebersamaan sesuai sila keempat dalam Pancasila juga terkandung dalam koperasi. Sebab segala pembiayaan dan roda perekonomian yang menentukan kemajuan maupun kemunduran koperasi menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggotanya. Koperasi juga memberikan kesempatan kepada anggota memberikan saran, masukan dan kritik melalui forum resmi sebagai implementasi dari kemerdekaan menyampaikan aspirasi (pasal 27 UUD 1945).

Mengacu kepada ciri-ciri ekonomi Pancasila sejatinya koperasi sudah memenuhi syarat antara lain koperasi digerakkan semangat modal finansial yang sudah disepakati bersama para anggota dalam mendorong adanya pemerataan sosial sesuai nilai kemanusiaan. Koperasi juga dapat menjadi sarana memupuk nasionalisme dimana melalui koperasi dibangun semangat mencintai bangsa dengan membeli produk di koperasi, memberikan pinjaman modal kepada anggota dalam memajukan usahanya dan mendorong perekonomian nasional yang tangguh.

Konsepsi ekonomi Pancasila yang termanifestasikan dalam bentuk koperasi dapat terlihat dari operasionalisasi berikut (Budimanta, 2012: 4-6) Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan gambaran pentingnya etika dan moral bangsa dalam perekonomian nasional. Para penggerak dan anggota koperasi harus menyadari bahwa setiap perbuatan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, sehingga dalam menjalankan koperasi selalu bertindak jujur, amanah, profesional, disiplin dan menjalankan etos kerja positif lainnya. Spirit ekonomi bermoral, beretika dan religiusitas menghendaki agar segala kelemahan sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak hadir dan berkembang dalam koperasi.

Kedua, menjadi penting dalam menjalankan kegiatan koperasi, dikembangkan semangat pembangunan ekonomi dan finansial dengan mengedepankan rasa keadilan. Nilai adil dan beradab dapat muncul dengan adanya kesadaran menyerap aspirasi anggota koperasi, mengajak partisipasi aktif anggota dalam memberikan masukan terhadap kerja pengurus koperasi dan pembagian Sisa Hasil Usaha yang adil dan merata, serta transparan terhadap anggota.

Ketiga, koperasi dapat membantu terciptanya sisi nasionalisme anak bangsa. Koperasi dapat memaksimalkan karya kreatif anggota untuk dijual di koperasi, menginisiasi semangat kegotongroyongan dalam memajukan usaha bersama antar anggota koperasi dan mendorong adanya pinjaman lunak dengan proses cepat dan mudah yang nantinya dapat dipakai untuk menjalankan kegiatan usaha sehingga semakin banyak bermunculan wirausahawan baru yang dapat mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat.

Keempat, koperasi dapat mendorong rakyat untuk bekerjasama mencapai tujuan bersama yaitu kemakmuran dan kesejahteraan anggotanya. Mekanisme kerja koperasi harus mampu memenuhi akses kebutuhan dasar anggotanya. Selain itu, koperasi harus mampu kreatif dalam

mengupayakan arus informasi mengenai peluang kerja sampai kerjasama usaha dengan anggotanya sehingga tercipta kesepakatan yang saling menguntungkan.

Kelima, mengupayakan keadilan sosial dalam arti, koperasi tidak membedakan status sosial maupun sesuatu yang mengarah kepada tindakan SARA. Selama anggota yang tergabung dalam koperasi memahami kewajibannya, maka mereka berhak mendapatkan hak dari apa saja yang diusahakan koperasi demi memajukan kepentingan usaha. Keadilan sosial dapat juga dimaknai pembagian hasil produksi koperasi secara nyata kepada anggotanya.

5. Keterbatasan

Artikel ini menggunakan studi literatur untuk menjelaskan isu yang berkembang dalam konteks koperasi dan ekonomi Pancasila. Riset mendatang perlu mengembangkan menambahkan beberapa pendapat ahli atau pakar melalui pendekatan wawancara langsung untuk memperoleh pandangan terkini mengenai poin-poin penting terkait ekonomi Pancasila dan koperasi.

6. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa poin penting. Pertama, ekonomi Pancasila Ekonomi Pancasila lahir atas kegelisahan sistem perekonomian nasional yang masih didominasi kapitalisme. Dengan adanya ancaman kapitalisme, potensi kekayaan alam dan manusia Indonesia tidak berjalan maksimal, sebab hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Sehingga penting menumbuhkan kesadaran kolektif agar bangsa Indonesia kembali kepada semangat dasarnya yaitu ekonomi Pancasila, dimana dalam prakteknya terwujud dalam bentuk koperasi.

Kedua, ekonomi Pancasila berakar dari lima sila dalam Pancasila, tumbuh dari kepribadian bangsa Indonesia dan mengusung spirit kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Sebagaimana diungkapkan Muhammad Hatta, bahwa ekonomi Indonesia harus mampu memproduksi kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari manusia Indonesia. Dapat pula disebut ekonomi jalan tengah atau alternative, sebab ekonomi Pancasila tidak memihak ekonomi kapitalis maupun sosialis.

Ketiga, koperasi adalah soko guru perekonomian Indonesia sehingga penting mengembangkan koperasi sesuai nilai yang terkandung dalam Pancasila. Koperasi harus mampu mengembangkan etika-moral, kemanusiaan, integrasi nasional, kerakyatan dan keadilan sosial.

Daftar Pustaka

- Budimanta, A. (2012). *Ekonomi Pancasila, Ekonomi Kita* Disampaikan pada Seminar Sistem Perekonomian Nasional menurut pasal 33 UUD 1945 oleh Pusat Studi Konstitusi, Universitas Tri Sakti. Jakarta 12 Juli 2012
- Hariyono. (2003). *Koperasi Sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila* Artikel - Th. II - No. 4 - Juli 2003
- Hastangka. (2007). *Refleksi Kritis Atas Konsep Ekonomi Mubyarto*. Skripsi. Fakultas Filsafat UGM: Yogyakarta.
- Kartasasmita, G. (1997). *Membangun Ekonomi Pancasila*. Makalah disampaikan pada Rakernas AMPI, Jakarta. 26 Agustus 1997.
- Madjid dan Swasono (ed), 1981. *Wawasan Ekonomi Pancasila*, Jakarta: Departemen Dalam Negeri
- Hatta, M.(1979). *Ekonomi Terpimpin*, Jakarta:Penerbit Mutiara
- Mubyarto, (2003). *Ekonomi Pancasila: Renungan Satu Tahun Pustep UGM*, Yogyakarta: PUSTEP UGM

- Rahardjo, D. (2004). *"Ekonomi Pancasila Dalam Tinjauan Filsafat Ilmu"*. Makalah disampaikan pada 6 Januari 2004.
- Rahardjo, D. (2009). "Menuju Sistem Ekonomi Indonesia". *Jurnal UNISIA*. Vol. XXXII No. 72.
- Swasono, Sri-Edi, (2010). *Ekspose Ekonomika Mewaspadaai Globalisasi dan Pasar Bebas*. Yogyakarta: PUSTEP-UGM.